

Judul : Hak angket KPK, partai-partai tak konsisten  
Tanggal : Kamis, 04 Mei 2017  
Surat Kabar : Koran Tempo  
Halaman : 1

## HAK ANGKET KPK PARTAI-PARTAI TAK KONSISTEN

Tak ada sanksi untuk kader yang memberi tanda tangan sebagai pengusul hak angket.

**JAKARTA**—Sejumlah petinggi partai menarik dukungan terhadap hak angket yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu. Sebanyak 25 anggota DPR lintas komisi menandatangani hak angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Mereka berasal dari semua fraksi, kecuali wakil dari Fraksi Partai Demokrat.

"Sekarang sikap PPP menolak," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, kemarin. Romahurmuziy menyatakan kadernya ikut menekan pada Jumat lalu karena ada dinamika di DPR.

Partai Kebangkitan Bangsa—bersama Partai Persatuan Pembangunan bergabung dengan partai koalisi pemerintahan—juga memerintahkan kader pengusul angket mencabut dukungan. Namun dua partai ini tak tegas akan memberikan sanksi kepada kader yang berbeda sikap dari instruksi partai. "Anggota kami sudah mencabut dukungan," kata Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.

Rapat paripurna DPR yang dipimpin Fahri Hamzah pada Jumat lalu menyetujui penggunaan hak angket, yang bermula dari desakan Komisi Hukum DPR agar KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani. Anggota Dewan dari Partai Hanura ini ditetapkan sebagai tersangka memberikan keterangan palsu pada persidangan kasus suap kartu tanda penduduk elektronik. Kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun ini juga menyeret Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Setya telah dicekal.

Partai NasDem, Golkar, dan PDI Perjuangan merupakan partai koalisi pemerintah yang menginginkan hak angket berlanjut. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan hak angket melekat pada fungsi pengawasan parlemen. Menurut dia, tak ada satu pun lembaga tanpa pengawasan. "Kita ingin KPK yang kuat, tapi kita tak boleh melemahkan Dewan," kata Paloh.

Partai Hanura menyatakan belum menentukan sikap. Setidaknya tujuh kader Hanura menjadi pengusul. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan baru akan meminta klarifikasi kader yang menekan hak angket. Dia menyatakan belum mengambil keputusan, termasuk memberi sanksi. "Politik ya politik, hukum ya hukum," kata dia, kemarin.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meyakini semua partai yang anggotanya telah menekan sebagai pengusul hak angket tetap utuh mendukung. "Tidak ada yang balik badan. Saya telah bicara dengan para pengusul dan pendukung," kata Fahri Hamzah di gedung DPR di Jakarta, kemarin.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan, jika partai berkomitmen memberantas korupsi, sikap partai dan fraksi semestinya sama. Menurut dia, jika konsisten melawan korupsi, partai memberikan sanksi kepada anggotanya yang telah menyetujui hak angket atas KPK. "Partai tak konsisten. Harus diuji benarkah sikap partai dan fraksi berbeda. Teliti juga benarkah anggota Dewan melawan sikap partai," kata Donal.

● FRANCISCO ROSARIANS | HUSSEIN ABRI | ARKHELAUS W. | INDIRI MAULIDAR | ANIARA



Angket KPK untuk  
Hambat Pengusutan  
Korupsi E-KTP

Halaman 4





## Petinggi Partai Bicara Angket KPK

**H**ak angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari usul yang ditandatangani 25 anggota parlemen dari sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah angket disahkan dalam rapat paripurna, sejumlah pucuk pimpinan partai mulai memerintahkan penolakan kepada kadernya. Ada pula yang bertahan mendukung atau memilih belum bersikap.

**"Saya tidak mengatakan hak angket belum diperlukan. Saya tidak mengerti soal hukum. Namun, prinsipnya, masalah hukum ya hukum, politik ya politik."**  
– Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

**"Karena tidak setuju, saya berharap tidak dilanjutkan lagi. Kami juga tak akan mengirim wakil (ke Pansus)."**  
– Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

**"Saya bisa memahami itu. Ketika ditanyakan, saya bilang silakan (Fraksi NasDem) Jalankan hak kalian dalam fraksi di DPR."**  
– Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

**"PPP akan mengirim protes tertulis kepada pimpinan DPR. Proses keputusan hak angket itu cacat hukum karena hanya keputusan sepihak, tidak secara demokratis."**  
– Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

**"Fahri Hamzah bukan lagi kader PKS. Tak ada satu pun kader PKS yang setuju hak angket."**  
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Imam.

**"Sikap Gerindra sudah jelas sejak awal (menolak hak angket)."**  
– Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

**"Kami baru akan membahas dalam rakernas di Lombok, 7-8 Mei 2017."**  
– Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman.

**"PDIP sudah menerima usulan angket saat di paripurna. Berikutnya adalah pemilihan anggota Pansus."**  
– Anggota Komisi Infrastruktur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Alex Indra Lukman.

**"Kami akan lawan dengan cara apa pun. Kalau memang tak mengirim wakil (ke Pansus) bisa menyelesaikan masalah, ya, tak usah kirim. Tapi, kalau tak menyelesaikan masalah, kami akan bertarung dalam pembahasan."**  
– Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan

ILUSTRASI: TEMPO/MAM YUNNI